



## Titik Balik Reformasi Sebagai Alat Pencapaian Demokrasi Berkeadilan

Shorea Helminasari<sup>1</sup>, Septiani Long Gering<sup>2</sup>, Amalia Salsabila<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia

E-mail: [shorea@uwgm.ac.id](mailto:shorea@uwgm.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-07-22 Revised: 2024-08-19 Published: 2024-09-06	The upheavals of May 1998 represented a watershed moment in Indonesian history, culminating in the successful overthrow of President Soeharto by a coalition led by students. This pivotal event underscored the widespread discontent with the existing regime. Following the demise of the New Order in 1998, Indonesia embarked on a new chapter. The reform movement emerged as a catalyst for profound change, reshaping various facets of Indonesian society, particularly in politics, economic development, as well as the refinement of the role of political parties as conduits for communication, socialization, recruitment, and the articulation and aggregation of interests. However, amidst these transformative changes, lingering doubts persist regarding whether the envisioned reforms can genuinely lead Indonesia toward becoming a truly democratic nation. Additionally, there remains uncertainty as to whether Indonesia has achieved comprehensive justice for all its citizens within a democratic framework. Foremost among the concerns is the evaluation of whether these reforms have indeed engendered positive outcomes for the Indonesian nation. This unresolved discourse forms the primary focus of our scholarly inquiry, as numerous unresolved issues await thorough examination and definitive answers. Through meticulous scrutiny of literature, including books, articles, and previous journals, this research aims to shed light on these pivotal questions.
<b>Keywords:</b> <i>Reform;</i> <i>Democracy;</i> <i>Justice.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-07-22 Direvisi: 2024-08-19 Dipublikasi: 2024-09-06	Kerusuhan Mei 1998 berujung pada keberhasilan mahasiswa menggulingkan kekuasaan Presiden Soeharto yang menjadi klimaks dari rasa ketidakpuasan masyarakat akan Orde Baru. Semenjak berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki babak aktual sebagai suatu negara. Reformasi seakan menjadi titik balik yang merubah total seluruh aspek kehidupan Indonesia di berbagai bidang terutama pada sistem politik, pemerataan sistem politik, kesejahteraan ekonomi dan pembangunan nasional, pengoptimalisasi fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, dan sarana agregasi kepentingan. Namun berangkat dari hal-hal tersebut, terdapat beberapa pihak yang masih mempertanyakan apakah yang kita sebut sebagai Reformasi itu benar-benar dapat menghantarkan Indonesia pada negara yang demokratis, kemudian apakah Indonesia sudah menjadi sebuah negara yang berdemokrat dimana seluruh rakyatnya merasakan keadilan yang menyeluruh, serta poin terpentingnya apakah reformasi telah membawa perubahann yang baik bagi bangsa Indonesia. Hal itulah yang akan menjadi fokus utama hadirnya kajian ilmiah ini, sebab masih begitu banyak hal-hal yang belum terselesaikan dan ditemui jawabannya. Melalui studi literatur dari buku-buku, artikel, maupun jurnal terdahulu, kajian ilmiah ini akan menjawab sederet pertanyaan-pertanyaan tersebut.
<b>Kata kunci:</b> <i>Reformasi;</i> <i>Demokrasi;</i> <i>Keadilan.</i>	

### I. PENDAHULUAN

Gerakan reformasi bukan hanya sekadar penggulingan rezim Orde Baru, namun juga tentang membangun Indonesia yang adil, merata, dan demokratis. Memaknai hadirnya reformasi memberikan ruang kepada setiap orang untuk memiliki kesempatan berkembang, bertumbuh dan memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Istilah reformasi sendiri tidak lagi menjadi istilah yang hanya diketahui oleh segelintir orang ataupun

suatu kelompok saja, begitupun dengan istilah demokrasi (Ridho, 2017). Kian hari istilah-istilah tersebut terus digaungkan pada buku-buku pelajaran di sekolah, bahkan kutipan-kutipan di media publik hingga menjadi perbincangan hangat sehari-hari ditengah masyarakat. Mulai dari para cendekiawan, mahasiswa, hingga masyarakat umum telah begitu fasih dalam membahas istilah reformasi dan demokrasi. (Sofyan, 2013).

Tidak hanya sampai disitu, berkaca dengan apa yang telah terjadi selama dua dasawarsa pasca reformasi yang terjadi hingga saat ini, selalu ada kata yang tercetus dan diperdebatkan, dipermasalahkan dan diperjuangkan, yang selalu menjadi tuntutan dalam kertas pada spanduk dan pada pamflet maupun selebaran brosur, apakah mereka benar-benar mengetahui makna yang sesungguhnya dari demokrasi. Tak jarang, setiap kali ada masalah yang timbul dan terjadi, kata-kata demokrasi akan disinggung. Seketika kata tersebut menjadi begitu sakral, misteri, dan telah dilukai dengan cap 'demokrasi telah mati'. (Weruin, 1997)

Demokrasi ialah, 'pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat' hal itu terucap dari seorang Presiden Amerika Serikat yakni Abraham Lincoln pada pidato singkatnya di tahun 1863 yang kemudian hingga hari ini menjadikan dirinya sebagai bapak demokrasi. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia pun berdiri menjadi negara yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, yang sama artinya dengan pejabat pemerintahan yang berkerja untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Namun apa yang terjadi selama orde baru justru berbanding terbalik. Tidak ada kesempatan rakyat untuk bersuara, tidak ada tempat untuk rakyat dapat berkontribusi dalam keberlangsungan negara, yang ada hanyalah kekuasaan yang terpusat pada penguasa. (Arifin, 2019)

Sepanjang 32 tahun Presiden Soeharto memimpin negeri, tidak terhitung lagi pelanggaran-pelanggaran, penyelewengan demi penyelewengan, hingga demokrasi terasa begitu jauh dan asing. Sejarah mencatat inflasi terparah, pelanggaran terberat akan HAM, ataupun kerusakan sistem politik terparah, semuanya terjadi pada masa orde baru berlangsung. Hingga pada puncaknya di akhir tahun 90-an, Asia mengalami krisis keuangan terburuk sepanjang Sejarah dan tentunya hal ini juga mempengaruhi kehidupan di Indonesia.

Pada saat itu, suhu iklim politik tiba-tiba saja terasa begitu panas. Letupan-letupan gejolak kecil mulai sering terjadi, kemudian dengan mengingat fakta bahwa sang penguasa telah menduduki tahta kekuasaannya sudah begitu lama semakin memperburuk keadaan yang ada pada saat itu. Kondisi yang bukannya kunjung membaik justru menjadi begitu buruk, Presiden Soeharto dinilai tidak mampu menangani keadaan dan kekacauan yang terjadi dimanamana sehingga tidak dapat terhindarkan. Himpitan masalah ekonomi, iklim politik yang memanas, konflik internal para pejabat semakin

memuncak, bahkan sederet unek-unek yang terpendam puluhan tahun layaknya seperti bom waktu yang hanya tinggal menunggu waktunya untuk meledak. Setiap suara yang ingin didengarkan selalu dibungkam dan tidak sedikit berujung pada tindak kekerasan. Pihak yang paling kuat menunjukkan keresahannya ialah kalangan mahasiswa, mereka maju dan tak gentar menjelma menjadi garda terdepan untuk menyuarakan suara rakyat.

Puncak meledaknya bom waktu pemerintahan Orde Baru terjadi pada bulan Mei tahun 1998, lingkungan kampus yang disebut-sebut sebagai 'miniatur negara' pun ikut ricuh dan gonjang-ganjing atas aksi penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti. Lengkaplah sudah penderitaan, seperti layaknya susunan kartu domino, bom waktu yang sebelumnya telah memercikan api kecil kini meledak dengan hebatnya. Seperti yang diketahui bersama, gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat sipil memiliki efek yang besar akan berjalannya suatu negara. Fakta yang terjadi dilapangan benar-benar memperlihatkan bahwa keresahan masyarakat sipil dan mahasiswa inilah yang membuat suatu pergerakan menuju perubahan, peristiwa itu pun dikenal dan dikenang sebagai kerusuhan 1998. Pada saat demonstrasi turun ke lapangan, tumpah ruah elemen ataupun golongan dan kelompok memenuhi setiap ruas jalan, entah warga sipil ataupun mahasiswa, bahkan anggota-anggota militer pun mewarnai kericuhan yang berbuntut pada kudeta yang berhasil menggulingkan kekuasaan Presiden kala itu.

Demokrasi sudah seharusnya menjadi sebuah sistem di era lahirnya reformasi karena di situlah kepentingan-kepentingan kehidupan masyarakat dikelola secara bersama-sama. Sebagai sebuah sistem, demokrasi mempunyai tiga elemen utama yaitu: *input*, proses, dan *output*. *Input* atau masukan dalam demokrasi mencakup segala bentuk partisipasi politik hingga protes dan kampanye politik. Masukan demokrasi jelas berupa aspirasi, partisipasi masyarakat, dan pemungutan suara secara formal (Djumadin, 2022). Pada elemen *input* ini adalah cara di mana warga negara memasukkan preferensi, kepentingan, dan kebutuhan mereka ke dalam proses politik. Kemudian masukan-masukan dari *input* diproses dalam demokrasi yang dimana pengambilan keputusan politik dibuat dan diimplementasikan. Tentu saja hal ini mencakup embaga-lembaga politik seperti parlemen, pemerintah, dan badan eksekutif, serta mekanisme pengambilan keputusan seperti pemungutan suara dan diskusi publik. Proses ini

harus transparan, inklusif, dan akuntabel. Dan yang terakhir adalah *output*, *output* adalah hasil dari proses politik. Hal ini mencakup kebijakan publik, undang-undang, dan keputusan politik lainnya yang mempengaruhi masyarakat. *Output* yang dihasilkan harus mencerminkan kepentingan dan kebutuhan beragam warga negara serta dihasilkan melalui proses yang demokratis. (Ulfiyyati et al., 2023)

Dalam analisis teoritis mengenai kontribusi gerakan reformasi terhadap proses demokratisasi di Indonesia, gerakan ini merupakan respons masyarakat terhadap pemerintahan otoriter Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade. Gerakan reformasi ditandai dengan gelombang protes, penindasan, dan boikot yang dipimpin mahasiswa yang pada akhirnya berakhir pada pengunduran diri Soeharto. Oleh karena itu alasan utama yang mendasari penulisan kajian ilmiah ini adalah ingin mengetahui bagaimana gerakan reformasi berkontribusi terhadap proses demokratisasi serta menilai dan mengidentifikasi dampak dari gerakan reformasi dalam mendorong demokrasi yang berkeadilan di Indonesia. Pentingnya hasil demokrasi yang praktis dan nyata bukan hanya sekadar basa-basi terhadap konsep demokrasi. Namun hal penting dalam pemerintahan demokratis ialah memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi bukan hanya sekedar retorika, tetapi benar-benar membawa perbaikan dalam kehidupan nyata warga negara. Dengan mengutip visi Lincoln yang menyoroti pentingnya kesetaraan dan keadilan sosial dalam sistem demokrasi, komitmen Lincoln untuk mengakhiri perbudakan dan mendorong kesetaraan di antara seluruh warga Amerika merupakan bukti pentingnya nilai-nilai ini dalam pemerintahan demokratis. (Suparno, 2012)

Demokrasi dan kesejahteraan sosial adalah dua konsep yang terkait dan dapat berinteraksi secara kompleks. Demokrasi memberikan hak bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan juga mempengaruhi kebijakan publik. Partisipasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi kondisi sosial mereka. Serta demokrasi memungkinkan masyarakat yang kurang beruntung memiliki suara yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesetaraan, karena semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan kajian ilmiah ini adalah metode kajian pustaka atau kajian literatur. Penulis melakukan analisis dengan membandingkan beberapa data yang relevan dengan judul yang diteliti. Dalam metode ini penulis mengumpulkan dan meneliti dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel dan dokumen lainnya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik kajian ilmiah. Penulisan dilakukan dengan membandingkan informasi dari sumber-sumber yang berbeda untuk mengidentifikasi pola, tren dan kesimpulan yang dapat mendukung kajian ilmiah ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Meskipun perjalanan reformasi 1998 telah berlangsung selama dua puluh enam tahun, tantangan dan perjuangan untuk mencapai tujuan reformasi masih terus berlanjut. Namun demikian peristiwa bersejarah tersebut tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia modern yang menandai kebangkitan kesadaran politik dan sosial masyarakat. Perjuangan pada tahun 1998 mengangkat istilah reformasi yang kemudian diikuti dengan harapan adanya perbaikan di berbagai bidang.

Dalam sistem demokrasi, keadilan merupakan pondasi utama yang harus ditegakkan. Keadilan memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang status sosial atau latar belakang, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus merasakan bahwa keadilan tidak hanya menjadi janji kosong, tetapi benar-benar tercermin dalam proses pengambilan keputusan, penegakan hukum, dan distribusi sumber daya. Konflik kekuasaan, tumpang tindih antara mayoritas dan minoritas, serta perbedaan lainnya harus diatasi dengan pendekatan yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak. Dengan demikian, sistem demokrasi dapat berfungsi secara optimal sebagai wahana untuk mencapai keadilan sosial dan politik yang sejati.

Meningkatnya kasus korupsi yang menggerogoti keuangan negara, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial menjadi penyebab utama runtuhnya orde baru pada tahun 1998. Rakyat Indonesia mulai menyadari bahwa kebijakan

pemerintah tidak sesuai dengan aspirasinya dan mulai bergerak untuk mengubah sistem politik yang ada. Periode ini dibatasi oleh kekuasaan yang sentralistik. Pasca jatuhnya rezim orde baru, Indonesia mengalami transisi menuju demokrasi yang masih dicakup oleh tantangan dan perubahan. Pemerintahan reformasi yang baru ditetapkan pada tahun 1998, dipimpin oleh Presiden BJ Habibie, berusaha membangun sistem politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Namun, transisi ini tidak mudah dan masih diwarnai oleh tantangan-tantangan seperti korupsi, kekerasan, dan ancaman politik. Pemerintahan reformasi juga harus menghadapi berbagai masalah seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan masalah-masalah lainnya yang diwarisi dari masa lalu.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mencatat kemajuan-kemajuan reformasi yang telah mengubah seluruh aspek kehidupan Indonesia, terutama dalam sistem politik, pemerataan kekuasaan politik, kesejahteraan ekonomi, pembangunan nasional, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, serta pertahanan dan keamanan dengan penghapusan dwifungsi ABRI yang kini menjadi TNI dan Polri, lalu pengoptimalisasi fungsi partai politik juga menjadi fokus dalam komunikasi politik, sosialisasi, rekrutmen, artikulasi kepentingan, dan agregasi kepentingan, ternyata masih banyak beberapa pihak yang mempertanyakan apakah reformasi benar-benar dapat membawa Indonesia menuju negara yang demokratis.

Dalam penulisan kajian ilmiah ini penulis menguraikan beberapa fokus pembahasan dalam Sistem Politik di Indonesia yakni: (1). Pemerataan Sistem Politik di Indonesia. (2). Kesejahteraan Ekonomi dan Pembangunan Nasional. (3). Pengoptimalisasi Fungsi Partai Politik.

## B. Pembahasan

Melihat dari adanya perubahan pemberlakuan konstitusi dari masa ke masa menggambarkan bahwa pertumbuhan sistem politik di Indonesia memang telah mengalami pasang surut sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejumlah perubahan sistem politik telah terjadi, baik sebelum maupun setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen, Indonesia mengalami periode otoriter dengan dominasi pemerintahan yang kuat, seperti pada masa

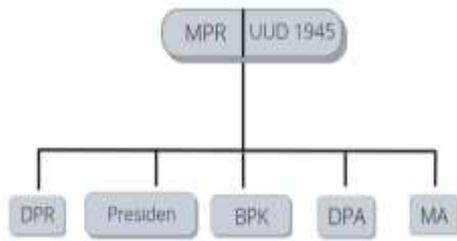
Orde Lama dan Orde Baru. Namun, setelah amandemen UUD 1945, Indonesia mengalami transisi menuju sistem politik yang lebih demokratis, meskipun masih menghadapi tantangan dan gejolak dalam prosesnya.

Pertanyaan lain juga muncul mengenai sejauh mana Indonesia telah mencapai demokrasi yang merata bagi seluruh rakyatnya, di mana keadilan dirasakan secara menyeluruh, dan yang terpenting, apakah reformasi telah membawa perubahan positif bagi bangsa Indonesia. Maka dari adanya kemajuan pada titik balik reformasi itu, diuraikan sebagai berikut agar dapat menjawab sejumlah pertanyaan yang dipertanyakan oleh orang-orang mengenai makna sejauh mana demokrasi membawa titik balik pencapaian cita-cita bangsa ini. Pada masa sebelum amandemen UUD 1945, konstitusi mengalami tiga kali pergantian, yaitu UUD 1945, konstitusi RIS, serta UUD 1950. Hal ini disebabkan oleh adanya kekacauan politik yang sehingga kekuasaan Presiden Soekarno mengalami keruntuhan. Sistem politik Demokrasi Pancasila sesuai UUD 1945 sebelum mengalami amandemen ialah sebagai berikut: (1). Bentuk Negara. (2). Majelis Permusyawaratan Rakyat. (3). Dewan Perwakilan Rakyat. (4). Presiden. (5). Dewan Perimbangan Agung. (6). Badan Pemeriksa Keuangan. (7). Mahkamah Agung

Untuk melihat perubahan yang signifikan terhadap sistem politik Indonesia sebelum dan sesudah mengalami amandemen UUD 1945 diuraikan atau digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Perubahan Sistem Politik Sebelum Amandemen UUD 1945

No	Sistem Politik Indonesia	Sebelum Amandemen UUD 1945
1.	Demokrasi Liberal	<p>Periode tahun 1945 – 1950</p> <p>Periode ini memakai Demokrasi Liberal, dengan memiliki beberapa ciri-ciri yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai-partai politik yang sangat berkuasa yang dapat memastikan kemana arah perjalanan negara melewati perwakilan lembaga.</li> <li>2. Eksekutif mempunyai kedudukan yang lemah, karena seringnya jatuh bangun yang disebabkan adanya mosi partai.</li> <li>3. Terdapatnya kebebasan dalam pers yang cukup baik, apalagi dalam periode ini peraturan mengenai sensor serta pelepasan yang telah berlaku semenjak zaman Belanda telah dicabut.</li> </ol>
2.	Demokrasi Terpimpin	<p>Periode tahun 1950 – 1965</p> <p>Periode ini memakai Demokrasi Terpimpin, dengan kualifikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partai-partai politik yang sangat lemah, kekuasaan politik ditandai dengan terdapatnya tarik ulur antara Soekarno (sebagai Presiden Indonesia), Angkatan Darat, serta Partai Komunis Indonesia (PKI).</li> <li>2. Kedudukan eksekutif yang dipimpin oleh seorang Presiden serta memiliki kewenangan yang sangat kuat. Pada saat itu Presiden merangkap jabatan yaitu sebagai Ketua DPA yang memiliki tugas sebagai pembuat serta selector dari produk lembaga legislatif.</li> <li>3. Kebebasan pers yang sangat berkurang. Pada waktu itu terjadi sebuah kejadian anti pers yang jumlahnya cukup banyak.</li> </ol>
3.	Demokrasi Pancasila	<p>Periode tahun 1966 – 1998</p> <p>Periode ini terjadi pada masa Orde Baru yaitu pada era pemerintahan Soeharto, yang memiliki parameter diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kedudukan partai politik yang lemah menyebabkan terdapatnya kontrol yang cukup ketat dan eksekutif serta badan perwakilan penuh dengan hak-hak eksekutif.</li> <li>2. Jabatan eksekutif (dalam Pemerintahan Soeharto) sangat kuat serta selalu ada campur tangan dalam kehidupan partai-partai politik dan menentukan jangkauan politik nasional. Adanya kebebasan pers yang terkekang dengan terdapatnya badan SIT yang kemudian diganti dengan SIUP.</li> </ol>

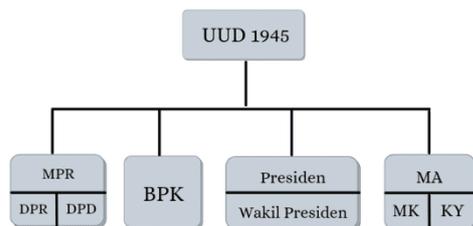


**Gambar 1.** Struktur Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945

**Tabel 2.** Perubahan Sistem Politik Sesudah Amandemen UUD 1945

No	Sistem Politik Indonesia	Sesudah Amandemen UUD 1945
		Sistem politik Indonesia setelah mengalami amandemen UUD 1945 yaitu:
		1. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan serta bentuk pemerintahannya yaitu republik yang saat ini terdiri atas 38 provinsi dengan menggunakan sistem desentralisasi sehingga adanya pemerintahan daerah tingkat pusat.
		2. Parlemen terdiri atas dua ruang yakni DPR dan DPD. Anggota DPR dipilih secara Pemilu oleh rakyat. Sementara, anggota DPD ialah perwakilan yang berasal di provinsi dipilih juga secara Pemilu di wilayahnya masing-masing dengan masa jabatan lima tahun.
		3. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah anggota yang berasal dari DPR dan DPD. Tugasnya adalah menetapkan Presiden dan Wakil presiden, serta mengahankannya dan mempunyai wewenang dalam melakukan perubahan serta menetapkan UUD.
		4. Presiden merupakan lembaga eksekutif tertinggi, jabatan Presiden ialah sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara serta dipilih dengan cara pemilu oleh rakyat dengan masa jabatan lima tahun. Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai wewenang untuk menunjuk dan membubarkan kabinet yang berasal dari menteri-menteri, Kerasulan, menteri tersebut langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
1.	Demokrasi Pancasila	5. Kedaulatan yudikatif dipegang serta dijalankan oleh Mahkamah Agung serta lembaga peradilan yang berada dibawahnya, yaitu Mahkamah Konstitusi, Komisi yudisial yang menangani tentang pelanggaran Hakasi Agung.
		6. Pemilu diadakan untuk melakukan pemilihan terhadap DPR serta DPD. Selain itu, juga melakukan pemilihan terhadap Presiden serta Wakil Presiden dalam satu paket.
		7. Sistem kepartaian adalah multipartai. Dengan jumlah partai yang telah melebihi partai pada tahun 2004 yaitu 24 partai serta tahun 2009 dengan jumlah 34 partai politik.
		8. BPK adalah lembaga yang mempunyai kedaulatan dalam memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab mengenai keuangan negara. Hasil dari pemeriksaan tersebut diserahkan kepada DPR, Anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dipilih oleh DPR dengan mendapat pertimbangan oleh DPD serta diresikan langsung oleh Presiden.
		9. Pada pemerintahan Daerah adalah Provinsi serta Kotamadya/Sabupaten dibuat juga lembaga legislatif eksekutif, serta yudikatif.
		10. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPRD Provinsi yang berada di daerah Provinsi serta DPRD Kotamadya/Kabupaten yang berada di daerah Kotamadya/Kabupaten. Anggotanya dipilih melalui pemilu yang langsung dari rakyat.
		11. Kekuasaan eksekutif dalam provinsi dipegang oleh seorang Gubernur, namun di daerah kotamadya/kabupaten dipegang oleh seorang Walikota/Bupati. Semua ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu yang berada di daerah masing-masing.
		12. Kekuasaan yudikatif dalam provinsi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi serta dalam kotamadya/kabupaten dijalankan oleh Pengadilan Negeri.

Berbeda dengan setelah dilakukannya amandemen, hasil perubahan UUD 1945 tidak terdapatnya lembaga tertinggi negara. Setelah dilakukannya amandemen terdapat beberapa badan yang dihapuskan, ialah DPA (Dewan Pertimbangan Agung). Di sisi lain terdapat beberapa badan yang telah diakomodasi, ialah DPD (Dewan Perwakilan Daerah), MK (Mahkamah Konstitusi), serta KY (Komisi Yudisial).



**Gambar 2.** Struktur Lembaga Negara Sesudah Amandemen UUD 1945

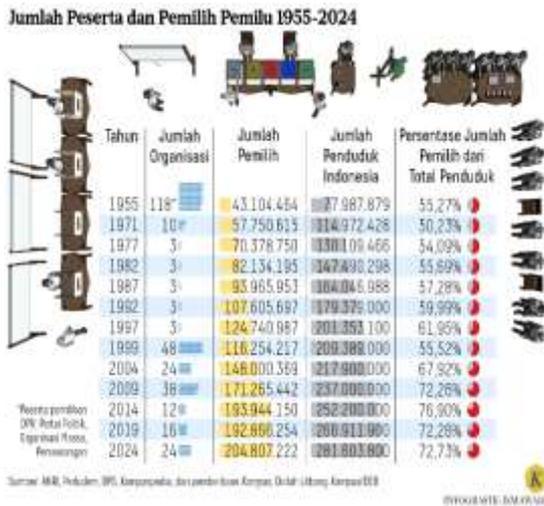
### 1. Pemerataan Sistem Politik

Pemerataan sistem politik yang terjadi selama periode reformasi di Indonesia membawa konsep demokrasi berkeadilan

yang mengutamakan kesetaraan akses dan partisipasi dalam proses politik bagi seluruh lapisan masyarakat. Selama masa reformasi, upaya pemerataan sistem politik menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik dan mendapatkan manfaat dari kebijakan publik yang diterapkan.

Dalam konteks demokrasi berkeadilan, pemerataan sistem politik bertujuan untuk mengurangi disparitas sosial, ekonomi, dan politik yang dapat menghambat partisipasi politik masyarakat. Langkah-langkah pemerataan tersebut mencakup peningkatan akses terhadap informasi politik, penguatan partisipasi politik dari berbagai kelompok masyarakat, serta menciptakan mekanisme representasi yang inklusif dan adil. Salah satu contoh peristiwa pemerataan sistem politik yang terjadi selama periode reformasi di Indonesia yang mendatangkan demokrasi berkeadilan adalah pelaksanaan pemilihan umum secara langsung dan adil. Sebelum reformasi, pemilihan umum di Indonesia sering kali diwarnai oleh berbagai praktik korupsi, manipulasi, dan ketidakadilan dalam proses pemungutan suara. (Putri, 2021)

Namun, dengan adanya reformasi dan perubahan dalam sistem politik, terjadi perbaikan signifikan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum lainnya dilaksanakan secara langsung dan transparan, memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dari masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih pemimpin mereka tanpa tekanan atau intimidasi. Melalui pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis dan berkeadilan, pemerataan sistem politik terwujud dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam proses politik. Hal ini memperkuat aspek demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.



**Gambar 3.** Jumlah Peserta dan Pemilih Pemilu 1955-2024

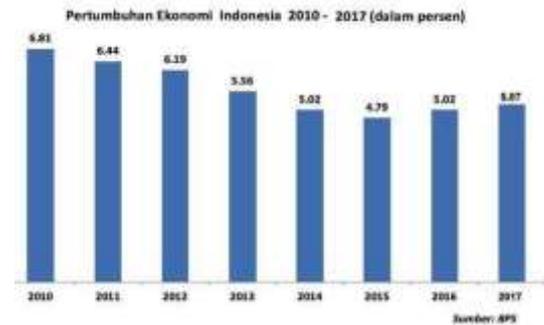
Dengan demikian, pelaksanaan pemilihan umum yang adil dan transparan selama periode reformasi merupakan contoh nyata dari pemerataan sistem politik yang mendatangkan demokrasi berkeadilan di Indonesia, di mana setiap suara warga negara memiliki nilai yang sama dan dihargai dalam menentukan arah masa depan negara.

## 2. Kesejahteraan Ekonomi dan Pembangunan Nasional

Pada awal masa reformasi, kondisi ekonomi Indonesia tergolong sulit karena warisan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela selama 32 tahun di bawah pemerintahan orde baru. Reformasi menjadi fase baru dalam tatanan pemerintahan untuk mengatasi dampak buruk dari praktik KKN yang melumpuhkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia. Melalui gerakan ini, upaya dilakukan untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat infrastruktur dan sektor-sektor ekonomi yang strategis. (Anggraini et al., 2014)

Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan memperbaiki tatanan kehidupan ekonomi dan pembangunan nasional, gerakan reformasi

diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan negara secara keseluruhan. Berbagai upaya dilakukan untuk memulihkan kembali ekonomi Indonesia yang mengalami tantangan dan ketidakstabilan.

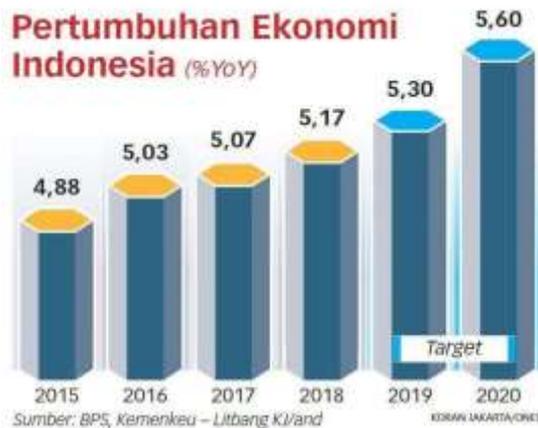


**Gambar 4.** Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2010-2017

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara perlahan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor yang mendukung, meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Berikut adalah beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat.

- Peningkatan Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM).
- Investasi dan Infrastruktur.
- Kebijakan Pemerintah yang Pro-Pertumbuhan.
- Stabilitas Makroekonomi

Meskipun terdapat beberapa kendala seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, ketimpangan ekonomi, dan tantangan global seperti krisis ekonomi, Indonesia terus mampu mengatasi kendala-kendala tersebut melalui kebijakan yang tepat dan strategi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan dukungan faktor-faktor ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat meskipun dihadapi dengan berbagai tantangan.



**Gambar 5.** Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Meskipun terdapat beberapa kendala seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, ketimpangan ekonomi, dan tantangan global seperti krisis ekonomi, Indonesia terus mampu mengatasi kendala-kendala tersebut melalui kebijakan yang tepat dan strategi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan dukungan faktor-faktor ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat meskipun dihadapi dengan berbagai tantangan.

### 3. Pengoptimalisasi Fungsi Partai Politik.

Menurut UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, definisi Partai Politik (parpol) adalah suatu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Partai politik juga bertujuan untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Keberadaan partai politik dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem politik atau sistem demokrasi yang berlaku. Partai politik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sistem demokrasi yang berlaku, namun sebaliknya, sistem politik yang berlaku juga akan menentukan ruang gerak dari partai politik. (Budiatri, 2015)

Setelah jatuhnya rezim orde baru, angin perubahan menerpa Indonesia. Kebebasan pers yang semakin terbuka memberikan peluang lahirnya partai politik baru dengan beragam ideologi yang bermunculan, baik

dalam bentuk ide-ide personal maupun kelompok atau organisasi. Pada tahun 1999, setelah tumbang rezim Suharto, terjadi lonjakan dalam pembentukan partai politik di Indonesia. Sebanyak 237 partai politik didirikan, namun hanya 48 partai politik yang berhasil lolos sebagai peserta pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan politik yang signifikan setelah era Suharto membuka ruang bagi kemunculan partai politik baru dengan berbagai ideologi dan visi yang beragam. Keberagaman ini mencerminkan dinamika politik dan demokrasi yang berkembang di Indonesia pasca reformasi.

Meskipun reformasi telah membawa kemajuan-kemajuan yang signifikan bagi negara ini, namun tantangan-tantangan yang harus diatasi untuk membangun sistem politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab juga masih sangat banyak. Untuk melihat apakah sistem politik demokrasi di Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem politik demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Hal yang terpenting untuk memperhatikan cita-cita dan upaya dalam mewujudkan demokrasi yang substansial adalah dimana demokrasi tidak memberikan celah bagi penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaan, baik dalam proses memperoleh kekuasaan maupun dalam menjaga kekuasaan yang dimiliki. (Irawan, 2016)

Sebagai masyarakat, kita memiliki peran penting sebagai pengontrol terhadap kebijakan pemerintah dan sebagai penjaga untuk mendeteksi potensi kejanggalan dalam sistem politik negara. Dengan demikian, kita dapat berperan dalam mempercepat proses demokratisasi yang lebih baik di masa depan. Keberhasilan demokrasi tidak hanya tergantung pada struktur politik, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi dan memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati, seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi yang merata. Dengan demikian, upaya bersama untuk dapat memperkuat demokrasi di Indonesia harus terus dilakukan agar negara dapat menuju pada sistem politik yang lebih demokratis,

inklusif, dan berkeadilan bagi semua warganya.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Titik balik reformasi menandai awal kebangkitan dalam perjuangan untuk memperjuangkan demokrasi. Demokrasi bukanlah jalan yang pintas atau instan, melainkan perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran, dinamika, dan dukungan yang saling mendukung. Titik balik reformasi sebagai alat pencapaian demokrasi yang berkeadilan bukan hanya sekedar slogan, melainkan menjadi bukti nyata yang memperlihatkan pada membaiknya sistem politik, pemerataan kekuasaan politik, pengoptimalisasi fungsi partai politik, kesejahteraan ekonomi, pembangunan nasional, Reformasi menjadi jalan yang tepat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia menuju negara yang tepat sasaran dan mampu memberikan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Kajian ini menegaskan pentingnya kesinambungan dalam memperbaiki dan memperkuat sistem politik Indonesia agar dapat mencapai demokrasi yang substansial, di mana keadilan, kesejahteraan, dan partisipasi politik menjadi landasan utama dalam menjaga stabilitas dan kemajuan negara. Perubahan yang terus-menerus dan evaluasi yang mendalam diperlukan untuk memastikan bahwa reformasi terus memberikan kontribusi positif dalam membangun demokrasi yang lebih baik dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

##### B. Saran

Untuk melihat apakah sistem politik demokrasi di Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem politik demokrasi di Indonesia telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Penting untuk memperhatikan upaya dalam mewujudkan demokrasi yang substansial, di mana demokrasi tidak memberikan celah bagi penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaan, baik dalam proses memperoleh kekuasaan maupun dalam menjaga kekuasaan yang dimiliki.

Sebagai masyarakat, kita memiliki peran penting sebagai pengontrol terhadap kebijakan pemerintah dan sebagai penjaga untuk mendeteksi potensi kejanggalan dalam

sistem politik negara. Dengan demikian, kita dapat berperan dalam mempercepat proses demokratisasi yang lebih baik di masa depan. Keberhasilan demokrasi tidak hanya tergantung pada struktur politik, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi dan memperjuangkan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati, seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan partisipasi yang merata. Dengan demikian, upaya bersama untuk memperkuat demokrasi di Indonesia harus terus dilakukan agar negara dapat menuju pada sistem politik yang lebih demokratis, inklusif, dan berkeadilan bagi semua warganya.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, Y., Ridlwan, Z., & Yasir, A. (2014). Perbandingan Perencanaan Pembangunan sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 9(1), 73-87.
- Arifin, I. (2019). Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 55-61. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i2.31>
- Budiatri, A. P. (2015). PELEMBAGAAN SISTEM KEPARTAIAN DI BAWAH SISTEM DEMOKRASI INDONESIA (1998-SEKARANG) THE INSTITUTIONALIZATION OF POLITICAL PARTY SYSTEM UNDER DEMOCRATIC SYSTEM IN INDONESIA (1998-NOW). *Jurnal Penelitian Politik/Volume*, 12(1), 33-54.
- Djumadin, Z. (2022). Demokrasi dan Masalah-Masalah Pembangunan Politik: Tinjauan Teoritis Terhadap Praktik Demokrasi di Era Reformasi. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 305-315. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i2.1858>
- Irawan, B. B. (2016). Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(1).
- Komara, E. (2015). Sistem politik Indonesia pasca reformasi. *Jurnal Social Science Education*, 2(2), 117-124.
- Putri, A. S. (2021). *Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi (1998-sekarang)*.

- Ridho, M. F. (2017). Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia. *Buletin Hukum Dan Keadilan*, 1(8e).
- Sofyan, A. (2013). Pemaknaan Demokrasi di Era Reformasi (Opini masyarakat jawa tengah terhadap demokrasi saat ini). *Politika*, 4(2), 1-9.
- Suparno, B. A. (2012). *Reformasi dan Jatuhnya Suharto*. Penerbit Kompas.
- Ulfiyyati, A., Muhamad, R., & Akbari, I. S. (2023). Demokrasi: tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 435-444.
- Weruin, U. U. (1997). Keadilan Sosial dan Demokrasi. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 4(2).